

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang Masalah**

Kemerdekaan yang diperoleh oleh rakyat Indonesia tidak bisa dilepaskan dari kontribusi para pahlawan bangsa dalam perjuangannya. Hingga kini, secara umum, Soekarno dan Hatta diakui sebagai tokoh yang sangat berjasa dalam perjuangan untuk mencapai kemerdekaan Indonesia. Mereka dikenal sebagai *Founding Fathers* yang berperan penting dalam menyampaikan teks proklamasi kemerdekaan Indonesia dan menjadi Presiden serta Wakil Presiden pertama Indonesia. Kedua tokoh ini memiliki visi tersendiri mengenai bangsa yang merdeka.

Perjalanan pemikiran dan perjuangan Soekarno dan Hatta adalah sebuah proses panjang dan penuh tantangan yang dapat ditelusuri mulai dari asal-usul dan tempat kelahiran mereka. Soekarno menekankan pentingnya persatuan dan kebesaran bangsa sebagai penggerak semangat rakyat. Di sisi lain, pemikiran tokoh tersebut akan membawa Indonesia menuju merdeka, meskipun terdapat banyak perbedaan. Perbedaan tersebut terpengaruh pada faktor budaya, pendidikan, lingkungan tempat mereka dilahirkan. Hatta lebih menekankan pada konsep kemakmuran serta demokrasi untuk seluruh rakyat Indonesia. Meskipun memiliki fokus yang berbeda, kedua pemimpin ini memiliki tujuan yang sama<sup>1</sup>

Salah satu kebijakan yang dikeluarkan oleh Bung Karno adalah Peraturan Pemerintah (PP) No. 6 pada 29 Desember 1946. Peraturan ini memutuskan untuk menambah jumlah anggota dari 200 menjadi 514 serta mengubah susunannya.

---

<sup>1</sup> (Alfian 1992) Hal 71

Kebijakan adalah keputusan publik yang dibuat negara yang dijalankan aparat birokrasi, dan sebuah proses politik yang kompleks. Proses ini mencakup tujuan negara, cara pengambilan keputusan, identifikasi keterlibatan, serta pelaksanaan kebijakan oleh aparat birokrasi. Kebijakan politik sebagai salah satu instrumen utama dalam menjalankan pemerintahan dan mencapai arah yang spesifik meliputi bidang sosial, lingkungan, ekonomi.<sup>2</sup>

Kondisi lingkungan tempat tinggal sangat mempengaruhi kedua tokoh nasional tersebut. Soekarno tumbuh besar di Indonesia yang penuh tekanan dari penjajah, sehingga mengembangkan pemikiran nasionalisme yang berfokus pada upaya Indonesia melepas diri pada Belanda. Sebaliknya, Hatta sempat menempuh pendidikan di Belanda, memiliki pemikiran yang berbeda. Soekarno dan Hatta telah menempuh perjalanan panjang menuju Indonesia Merdeka. Bagi kedua tokoh ini, perjalanan tersebut tidaklah mudah dan melibatkan banyak hal yang belum diketahui.<sup>3</sup>

Setelah proklamasi kemerdekaan, Soekarno dan Hatta menjadi pemimpin bangsa Indonesia. Keduanya bekerja sama dalam pemikiran dan tindakan. Sebagai dwitunggal, mereka memainkan peranan sangat penting dalam peristiwa detik-detik Proklamasi kemerdekaan. Sejak Proklamasi, perjalanan kedua tokoh ini dalam pemerintahan menghadapi banyak situasi berbeda terkait rencana politik. **Malikul Kusno, “Bung Hatta, Dari Era Kolonial Hingga Orde Baru: Sebuah Refleksi,” Konfrontasi: Jurnal Kultural, Ekonomi dan Perubahan Sosial 3, no. 1 (2016): 53–66.** Kesimpulan dari kutipan tersebut mengacu pada berbagai kondisi yang

---

<sup>2</sup> (Budiharjo 1992) Hal 12

<sup>3</sup> (Legge 1985)Hlm 20

dihadapi oleh Soekarno dan Hatta dalam perjalanan pemerintahan mereka setelah Proklamasi Kemerdekaan. Ini mungkin merujuk pada beragam tantangan politik dan strategi yang harus mereka hadapi dalam membangun negara yang baru merdeka. Secara keseluruhan, kutipan tersebut menggambarkan peran penting Soekarno dan Hatta dalam sejarah Indonesia serta kerja sama yang kuat antara keduanya dalam mencapai kemerdekaan dan memimpin kemajuan negara.

Kedua tokoh tersebut berpandangan berbeda, terutama pada strategi politiknya. Bung Karno bertentangan dengan Bung Hatta karena Bung Karno bermaksud menggunakan revolusi untuk mengakhiri kapitalisme. Oleh karena itu, segala tindakan, termasuk menasionalisasi perusahaan-perusahaan milik Belanda, harus dilakukan tanpa memperhatikan berbagai aspek hukum di belakangnya, karena begitulah seharusnya revolusi yang belum selesai berjalan. Sementara itu, Bung Hatta (juga Sjahrir) dengan tegas menyatakan tidak ingin menasionalisasikan perusahaan bekas penjajahan kolonial. Ini menunjukkan sikap reformis Bung Hatta, yang menginginkan segala sesuatu sesuai dengan aturan. Dari pernyataan tersebut, dapat disimpulkan bahwa perbedaan pandangan antara Soekarno dan Hatta mencerminkan perdebatan yang kompleks mengenai strategi dan orientasi politik pasca-kemerdekaan Indonesia.<sup>4</sup> Masing-masing tokoh memiliki visi dan pendekatan yang berbeda untuk membangun negara baru yang merdeka. Ini adalah salah satu pemikiran yang bertentangan antara Bung Karno dan Bung Hatta, dan masih ada berbagai pertentangan lainnya.

Pengaruh dari pertentangan Soekarno-Hatta dalam berbagai bidang, salah satunya terlihat setelah Moh. Hatta mengundurkan diri dari pemerintahan Soekarno.

---

<sup>4</sup> (Tunggul 2003)Hlm 233-234

Ketidakpuasan di daerah-daerah meningkat akibat pemerintahan otoriter Soekarno. Sebelum mengundurkan diri, Hatta pernah menyatakan bahwa militer sebaiknya tidak terlibat dalam politik (konsep Dwifungsi), namun militer yang sudah terlibat dalam politik enggan melepaskan jabatannya. Dari pernyataan tersebut, dapat disimpulkan bahwa pertentangan antara Soekarno dan Hatta memiliki dampak serius pada stabilitas politik, ketidakpuasan di daerah-daerah, dan konflik internal dalam tubuh militer Indonesia.<sup>5</sup> Hal ini menunjukkan bahwa ketegangan politik dan perselisihan antara dua tokoh penting ini memiliki dampak besar pada perkembangan sejarah Indonesia pada masa itu.

Melihat pertentangan kedua tokoh ini, serta situasi Indonesia pada saat itu semakin memburuk karena mengutamakan kepentingan partai. Harapan masyarakat Indonesia agar pemerintah bertindak sesuai dengan UUD 1945 belum terpenuhi. Perbedaan perspektif Soekarno dan Hatta mengenai arah dan tujuan politik Indonesia sangat mencolok. Soekarno menganut pandangan politik yang nasionalis, ingin menjadikan negara ini kuat maupun berdaulat. Sementara, Hatta memiliki perspektif politik yang lebih liberal, menginginkan Indonesia menjadi negara yang demokratis dan modern. Pertentangan antara Soekarno dan Hatta lebih fokus pada hal-hal prinsipil, terutama dalam strategi perjuangan, bentuk negara, dan susunan pemerintahan.

Penulis tidak bermaksud menghidupkan kembali semangat pertentangan antara kedua tokoh tersebut, melainkan ingin menyelidiki gagasan besar yang diemban kedua tokoh sebagai anak bangsa. Hal ini memiliki dampak signifikan yang mempengaruhi kehidupan berbangsa selanjutnya. Perbedaan antara kedua

---

<sup>5</sup> (Herbert 2001) Hal 399

tokoh bisa dijadikan contoh karena meskipun memiliki pendapat yang bertentangan, Soekarno dan Hatta tetap solid dalam membangun bangsa Indonesia. Sehingga dapat meneliti *Soekarno Hatta Dalam Pertentangan Kebijakan Politik Indonesia 1945-1956*.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Rumusan masalah mengenai pertentangan kebijakan politik Soekarno-Hatta di Indonesia antara tahun 1945 hingga 1956 menghasilkan permasalahan yang dapat diteliti, yaitu:

1. Bagaimana kebijakan dan Kondisi politik Indonesia 1945-1956 ?
2. Bagaimana awal mula pertentangan kebijakan politik terjadi antara Soekarno-Hatta ?
3. Bagaimana akibat dari pertentangan kebijakan politik terhadap sistem pemerintahan ?

## **1.3 Ruang Lingkup Penelitian**

Peneliti membatasi diri pada dua aspek lingkungannya. Secara spasial, penelitian ini mencakup wilayah Indonesia karena periode ini merupakan fase penting dalam sejarah Indonesia yang mencakup perjuangan menuju kemerdekaan, perdebatan politik antara pemimpin seperti Soekarno dan Hatta, serta perubahan signifikan dalam struktur politik dan pemerintahan Indonesia. Dengan membatasi penelitian pada wilayah Indonesia, ini adalah pendekatan yang tepat untuk memfokuskan analisis pada konteks yang relevan dan langsung terkait dengan topik penelitian. Dengan memusatkan fokus pada Indonesia, penelitian dapat lebih mendalam dan spesifik dalam memahami peristiwa dan kebijakan politik dalam konteks sejarah Indonesia.

Dalam konteks temporal, dimulai dari tahun 1945 ketika Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya. Sebelum terbentuknya MPR dan DPR, KNIP dipercaya memegang kekuasaan legislatif serta berperan dalam menentukan garis besar Haluan Negara. Menghadapi situasi mendesak, KNIP menjalankan tugas sehari-hari melalui Badan Pekerja di pilih dari anggota KNIP dan bertanggung jawab kepada Komite Nasional Pusat. Pada titik akhir penelitian, pada tahun 1956, Wakil Presiden pertama, Moh. Hatta, mengundurkan diri dari jabatannya sebagai Wakil Presiden Republik Indonesia.

#### **1.4 Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan penelitian yang diangkat dari rumusan masalah tersebut:

1. Untuk mengetahui kebijakan politik Indonesia 1945-1956
2. Untuk mengetahui awal mula pertentangan kebijakan politik terjadi antara Soekarno-Hatta
3. Untuk mengetahui akibat pertentangan kebijakan politik terhadap sistem pemerintahan Indonesia

#### **1.5 Manfaat Penelitian**

1. Manfaat bagi penulis

Diharapkan penulis memahami dan menambah kompetensinya mengenai pertentangan kebijakan politik Soekarno-Hatta di Indonesia pada tahun 1945-1956, juga sebagai standar kecakapan penulis mengevaluasi, mengkaji serta membangun kembali kejadian sejarah untuk disajikan berbagai karya sejarah sesuai kriteria penulisan.

## 2. Bagi Universitas Jambi

Proposal skripsi ini harapannya sebagai sumber literatur para pembaca di Universitas Jambi atau di luar universitas tersebut yang tertarik dalam mendalami informasi tentang pertentangan kebijakan politik Soekarno-Hatta di Indonesia pada periode 1945-1956.

## 3. Bagi Pembaca

Proposal skripsi ini sebagai sumber kompetensi terbaru pembaca mengenai Soekarno-Hatta dalam pertentangan kebijakan politik Indonesia pada tahun 1945-1956.

### **1.6 Penelitian Yang Relevan**

Penelitian ini mengkaji pertentangan kebijakan politik Indonesia pada tahun 1945-1956, namun literatur yang tersedia masih terbatas. Berbagai masalah terkait tempat, waktu, dan karakteristik muncul dalam proses penelitian ini. Peneliti telah mengacu pada beberapa referensi seperti buku, skripsi, dan jurnal yang relevan. Namun, peneliti menemukan satu sumber yang menonjol di antara berbagai referensi yang relevan, yang dapat digunakan sebagai pembanding untuk mengevaluasi kedalaman permasalahan.

Pertama, skripsi yang ditulis oleh Hadi Hartanto berjudul "Sejarah Pertentangan Soekarno-Hatta dan Pengaruhnya Terhadap Kebijakan Politik Indonesia 1956-1965". Penelitian ini menyoroati awal pertentangan antara Soekarno dan Hatta yang dimulai dari perlawanan aktif terhadap kolonialisme Belanda. Setelah menjadi presiden dan wakil presiden, keduanya terlibat dalam pergulatan yang intens, terutama dalam pembuatan kebijakan-kebijakan. Contohnya adalah ketika Bung Hatta mengumumkan Maklumat Nomor X tahun 1945 tanpa izin dari

Soekarno, yang pada gilirannya mengurangi pengaruh presiden secara tidak langsung di lembaga-lembaga lainnya. Dengan demikian, fokus pertama lebih menekankan pada periode pasca-kemerdekaan yang lebih lanjut dalam sejarah Indonesia, sedangkan fokus kedua lebih mengarah pada tahun-tahun awal setelah proklamasi kemerdekaan. Masing-masing judul memiliki konteks dan fokus analisis yang berbeda dalam memeriksa pertentangan Soekarno-Hatta dalam kebijakan politik Indonesia.

Kedua, jurnal yang disusun oleh Kasirun, Iskandar Syah, dan Wakidi berjudul "Peranan Mohammad Pada Masa Pemerintahan Parlementer 1948-1956". Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa selama pemerintahan parlementer Mohammad Hatta dari tahun 1948 hingga 1956, peran beliau dapat dibagi menjadi tiga bagian utama. Pertama, sebagai perdana menteri terkenal menjadi pemimpin yang cenderung melaksanakan kebijakan diplomasi. Kedua, Hatta memainkan peran penting sebagai ketua delegasi dalam Konferensi Meja Bundar (KMB), di mana ia turut berperan dalam menjamin pengakuan kedaulatan Indonesia dan hubungan dengan Belanda, yang ditandai dengan penandatanganan dokumen resmi hasil KMB. Ketiga, Hatta juga berperan sebagai tokoh utama dalam pembangunan ekonomi nasional, mengadvokasi kebijakan ekonomi sosial demokratis dan mendorong konsep ekonomi nasional berbasis koperasi sebagai landasan ekonomi Indonesia.

Perbedaan penelitian diatas dengan penelitian yang ditulis yaitu. Fokus Utama:"Peranan Mohammad Pada Masa Pemerintahan Parlementer 1948-1956" berfokus pada peran Mohammad Hatta selama periode pemerintahan parlementer di Indonesia, dengan penekanan pada peranannya dalam mengelola pemerintahan

dan politik pada saat itu."Soekarno-Hatta dalam Pertentangan Kebijakan Politik Indonesia 1945-1956" lebih umum dan melibatkan peran baik Soekarno maupun Hatta dalam konteks pertentangan kebijakan politik yang berlangsung selama periode tersebut, bukan hanya di masa pemerintahan parlementer.

Ambrosius Oky Sumantri menulis tiga skripsi dengan judul "Mundurinya Mohammad Hatta Sebagai Wakil Presiden Tahun 1956". Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa pengunduran diri Mohammad Hatta pada tahun 1956 terutama karena faktor yang ada. Faktor tersebut meliputi ketidakpuasan pemerintahan yang dianggapnya tidak lagi sesuai aspirasi bangsa. Hatta melihat politisi baik di dalam pemerintahan maupun di partai politik telah kehilangan konsistensi dalam memperjuangkan kepentingan rakyat. Selain itu, sebagai wakil presiden yang diatur oleh konstitusi, Hatta merasa tidak memiliki kekuatan yang cukup untuk mengawasi tindakan-tindakan politisi dan pemerintahan dalam menangani berbagai permasalahan bangsa.

Perbedaan penelitian sebelumnya dengan penelitian penulis adalah waktu dan lingkup, yaitu terbatas pada peristiwa mundurnya Mohammad Hatta pada tahun 1956 dan kemungkinan dampaknya pada politik Indonesia pada saat itu. Soekarno-Hatta dalam Pertentangan Kebijakan Politik Indonesia 1945-1956 mencakup periode yang lebih luas, dari tahun 1945 hingga 1956, dan mempertimbangkan berbagai aspek dari pertentangan kebijakan politik antara Soekarno dan Hatta. Soekarno-Hatta dalam Pertentangan Kebijakan Politik Indonesia 1945-1956 mencakup perbedaan pendekatan dan pandangan politik antara Soekarno dan Hatta dalam berbagai isu politik selama periode tersebut, serta dampaknya pada perkembangan politik Indonesia.

## 1.7 Kerangka Konseptual

“Soekarno–Hatta Dalam Pertentangan Kebijakan Politik Indonesia 1945-1956”. Dapat dilihat melalui kerangka konseptual maka penelitian ini menggunakan teori sejarah pemikiran.

Sejarah pemikiran merupakan terjemahan dari *history of thought history of ideas*, atau *intellectual of the history role of ideas* Sejarah pemikiran *historical events* dapat didefinisikan sebagai *the study and process*. Semua perbuatan manusia pasti dipengaruhi pemikiran<sup>6</sup>. Setiap sejarah ialah pemikiran, pemikiran hanya mungkin dilakukan oleh individu, serta sejarawan yang bertugas untuk merekonstruksi kembali pikiran yang ada pada masa lalu.

Beragam jenis pemikiran terdiri dari politik, agama, ekonomi, sosial, hukum, filsafat, budaya, dan sebagainya yang bisa kita sebagai pemikiran teoretis<sup>7</sup>. Tugas sejarah pemikiran adalah (1) mengkaji pemikiran-pemikiran besar yang mempengaruhi peristiwa sejarah, (2) meneliti konteks sejarah di mana pemikiran-pemikiran tersebut muncul, tumbuh, dan berkembang, dan (3) mengeksplorasi pengaruhnya terhadap masyarakat umum, yaitu mencari "hubungan antara filsuf, intelektual, pemikir, dan kehidupan nyata jutaan orang yang menjalani kehidupan sehari-hari" **Crane Broughton, “The Shaping Of Modern Thought” (Englewood N.J, 1963), Hlm 4.** Tugas ketiga ini mencakup upaya untuk memahami hubungan antara elit intelektual dan tindakan konkret masyarakat.

Dalam buku "Mohammad Hatta: Biografi Politik" karya Deliar Noer, konsistensi Hatta dalam sikapnya terhadap komunisme sangat terlihat. Pada tahun

---

<sup>6</sup> (Stromberg 1968) Hlm 3

<sup>7</sup> (R.G 1956) Hlm 302-315

1931 ketika masih belajar di Belanda, Hatta dipecat dari Perhimpunan Indonesia (PI), sebuah organisasi yang pernah dipimpinnya selama tiga tahun, setelah organisasi tersebut dikuasai oleh anggota-anggota komunis yang mengikuti garis Partai Komunis Belanda. Buku tersebut juga menggambarkan Hatta sebagai seorang puritan dan demokrat. Sikap puritannya sudah terlihat saat belajar di Belanda, dan ini tampaknya menjadi salah satu alasan perpisahannya dengan Sukarno pada tanggal 1 Desember 1956.

Sukarno sering melakukan perjalanan ke luar negeri sejak tahun 1956, yang Hatta anggap sebagai pemborosan dan kritiknya terhadap demokrasi terpimpin yang terlihat dalam Maklumat Konsepsi Pemerintah Presiden pada November 1945 dan 1957. Dia juga menentang Demokrasi Terpimpin pada 22 April 1959. Pada tahun 1960, Sukarno menulis "Demokrasi Kita", dan pada tahun 1967, dia berusaha mendirikan Partai Demokrasi Islam Indonesia. Ketika Sukarno percaya bahwa PKI mengakui Pancasila, Hatta mengomentari bahwa mengharapkan materialis untuk percaya pada Tuhan sama saja dengan mengharapkan seekor ayam bisa memiliki tanduk<sup>8</sup>.

Soekarno memiliki pandangan yang sangat berbeda dengan Moh Hatta, terutama dalam hal bentuk negara. Soekarno mendukung Negara Kesatuan, sedangkan Hatta cenderung lebih liberal dalam pendekatannya. Pada masa mudanya, Soekarno menunjukkan minat yang kuat terhadap persatuan nasional. Pada tahun 1927, dia mengamalkan gagasan ini melalui PPPKI dan menerapkan "Sentralisme demokratis" serta ketaatan yang ketat terhadap perintah-perintah. Upaya ini kemudian diarahkan untuk diimplementasikan dalam bentuk negara

---

<sup>8</sup> (Noer 1990b) Hal 454

Indonesia yang merdeka, yang menginginkan sebuah negara bangsa<sup>9</sup>.

Moh. Hatta memiliki pandangan yang berbeda dengan Soekarno mengenai bentuk negara, ia mendukung konsep Negara Serikat sebagai alternatif dari Negara Kesatuan. Hatta menolak gagasan negara kesatuan dengan tegas dan lebih memihak pada ide pembentukan negara serikat, yang menurutnya lebih sesuai dengan prinsip kedaulatan rakyat. Dalam salah satu tulisannya yang berjudul "Ke Arah Indonesia Merdeka" yang diterbitkan pada tahun 1932, Hatta menjelaskan konsep negara serikat dan mengekspresikan kekecewaannya terhadap praktik kolonialisme. Di samping itu, Hatta juga menunjukkan simpati terhadap gerakan kemerdekaan yang menonjolkan identitas nasional yang kuat, dengan tujuan untuk memperkuat individualitas manusia serta memperkuat kedaulatan bangsa sendiri<sup>10</sup>.

Bung Hatta mengartikan kebangsaan sebagai inklusi dari berbagai golongan, lapisan masyarakat, serta perbedaan status sosial, kecerdasan, dan latar belakang rakyat. Di masa lalu, Indonesia dipimpin oleh raja dengan sistem otokrasi dan feodalisme yang berlaku. Menurut Hatta, rakyat harus berjuang keras untuk mencari nafkah sambil memikirkan masalah politik dan keselamatan negara. Bung Hatta selalu bermimpi tentang kebangsaan Indonesia yang melibatkan peran penting kaum intelektual dalam menentukan masa depan bangsa. Gagasan terkini Hatta adalah tentang lahirnya republik yang menggabungkan pemerintahan berdasarkan kehendak rakyat melalui wakil-wakil atau majelis perwakilan<sup>11</sup>.

Pertentangan antara Hatta dan Soekarno pada dasarnya berakar pada

---

<sup>9</sup> Tunggul alam, Op.cit . Hal 123

<sup>10</sup> (Swasono 1980) Hal 21

<sup>11</sup> (Mavis 1991) Hal 78-79

perbedaan prinsip pemikiran keduanya yang berlawanan. Selain itu, adanya perbedaan kedua sikapnya, serta cara kepemimpinannya. Meskipun kedua tokoh memiliki satu arah yaitu Memerdekakan Indoneisa mereka terpaksa mengatasi perbedaan mereka untuk mencapai tujuan bersama. Namun, perselisihan antara mereka muncul kembali saat Indonesia merdeka sepenuhnya.

Pertentangan antara Soekarno dan Hatta terutama muncul dalam sistem pemerintahan yang berdemokrasi. Tokoh tersebut secara terbuka menyuarakan perbedaan pendapat mengenai sistem dan pemerintahan yang cocok bagi Indonesia. Ketidaksepakatan dalam pandangan ini semakin memperkuat keinginan Hatta untuk mengambil langkah mundur, keputusan ini dipengaruhi oleh ciri kepemimpinannya Soekarno, yang kurang disukai oleh Hatta. Tetapi, Hatta memiliki penjelasan dalam berbagai bentuk pengambilan keputusan<sup>12</sup>.

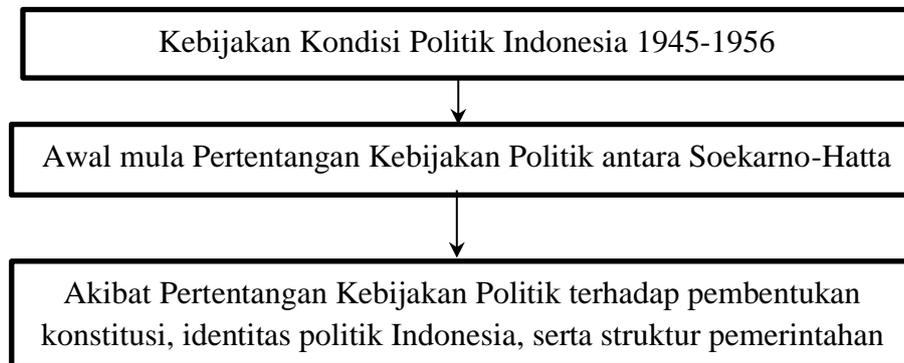
Ketidaksepakatan Hatta tercermin dalam beberapa hal, termasuk pandangannya terhadap partai politik, penolakannya terhadap usulan Soekarno untuk mengintegrasikan Partai Komunis Indonesia (PKI) ke dalam pemerintahan, serta pendapatnya tentang model demokrasi yang sesuai bagi Indonesia. Selain itu, Hatta juga tidak puas dengan sikap Soekarno sebagai pemimpin negara yang cenderung otoriter daripada konstitusional<sup>13</sup>.

Dari penjelasan diatas, maka bisa dilihat dalam kerangka berfikir yang menjelaskan alur penelitian:

---

<sup>12</sup> (Afan 2004) Hal 76

<sup>13</sup> (Adams C. 2018) Hlm 156



**Gambar 1.1.** Bagan Kerangka Penelitian

## 1.8 Metode Penelitian

Penelitian menggunakan metode kajian sejarah yang sesuai dengan pendekatan sejarah. Berdasar penelitian Gottschalk, metode sejarah sebagai proses kritis untuk menganalisis serta menelaah peristiwa-peristiwa masa lalu. Pendekatan ini meliputi langkah-langkah seperti pengumpulan sumber, kritik terhadap sumber, interpretasi sumber (penafsiran), kemudian penulisan sejarah (historiografi).

Penelitian mengenai Soekarno-Hatta Dalam Pertentangan Kebijakan Politik Indonesia 1945-1956 menggunakan metode penelitian sejarah, yang umumnya terdiri dari tahapan heuristik, kritik sumber, interpretasi, dan historiografi. Metode penelitian sejarah sebagai cara maupun teknik untuk merekonstruksi peristiwa dahulu. Metode ini terdiri dari empat tahapan utama:

### 1. Heuristik

Heuristik adalah metode atau teknik dalam mendapatkan kesesuaian sumber sehingga studi dilakukan dengan terstruktur serta menyeluruh<sup>14</sup>. Berbagai sumber

---

<sup>14</sup> (H 2012) Hlm 67

maupun data diperoleh penulis berkaitan dengan Soekarno-Hatta dalam Pertentangan Kebijakan Politik Indonesia ditemukan melalui penelusuran literatur. Penelitian ini melibatkan proses pencarian dan pengumpulan informasi dari berbagai sumber tulisan ilmiah yang relevan dengan topik penelitian. Salah satu temuan sumber atau data penelitian adalah pidato "Lahirnya Pancasila" yang disampaikan oleh Soekarno pada sidang BPUPKI pada tanggal 1 Juni 1945.

a. Sumber Primer

Sumber primer merujuk pada informasi langsung dari individu yang menjadi saksi atau terlibat dalam suatu peristiwa. Mereka adalah saksi mata yang mengalami peristiwa tersebut dan menyaksikannya dengan indera pribadi mereka, atau mendokumentasikannya menggunakan peralatan seperti tulisan atau fotografi<sup>15</sup>. Sumber primer juga dapat berupa manuskrip atau arsip yang merekam peristiwa tersebut secara langsung. Sumber primer ini dianggap memiliki posisi yang paling penting di antara sumber-sumber lainnya. Sumber primer adalah pidato Soekarno tentang "Lahirnya Pancasila" pada sidang BPUPKI tanggal 1 Juni 1945, seperti yang terdokumentasikan dalam buku karya Wawan Unggul Sakti yang berjudul *Demi Bangsa : Pertentangan Soekarno-Hatta*, 2003

b. Sumber Sekunder

Sumber sekunder adalah karya yang dibuat oleh para sejarawan atau peneliti dalam merekonstruksi peristiwa sejarah, dalam hal ini terfokus pada tokoh Soekarno dan Hatta. Beberapa contoh temuan untuk sumber sekunder:

---

<sup>15</sup> (Ismaun 2005) Hlm 50

- 1) Buku karangan Wawan Unggul Sakti yang berjudul *Demi Bangsaaku : Pertentangan Soekarno- Hatta*, 2003
- 2) Buku karya Mavis Rose yang berjudul *Biografi Politik Mohammad Hatta 1991*
- 3) Buku karya Soekarno yang berjudul *Biografi Politik* yang ditulis kembali oleh John D Legge 2003

## 2. Kritik Sumber

Pada tahap ini, sejarawan menghadapi tantangan signifikan pada penelitiannya. Sumber sejarah seringkali masih belum cukup dan sulit untuk ditemukan sumber yang dapat dipercaya kebenarannya<sup>16</sup>. Oleh karena itu, untuk memastikan keandalan sumber sejarah, peneliti perlu mengkritisi sumber tersebut.

### a. Kritik Intern

Kritik internal, seperti yang dinyatakan dalam istilahnya, berkonsentrasi pada aspek "internal" yang mengacu pada evaluasi sumber yang didapat, kemudian akan digunakan sebagai bahan dalam penulisan skripsi. Kritik internal dilakukan untuk menguji keandalan dan keabsahan dari sumber yang dikumpulkan. Adapun langkah-langkahnya meliputi perbandingan antara satu sumber dengan sumber lainnya<sup>17</sup>.

### b. Kritik Ekstern

Peneliti memilih buku memeriksa apakah buku tersebut relevan dengan masalah penelitian, mencatat nama penulis, tahun penerbitan, serta tempat dan penerbitannya. Selain itu, peneliti juga memeriksa apakah buku tersebut telah mengalami revisi atau masih dalam bentuk aslinya. Hal yang sama dilakukan

---

<sup>16</sup> Ibid ,Hlm 48

<sup>17</sup> Sjamsuddin H., Op.cit h. Hlm 105

dalam memilih artikel, jurnal, dan dokumen lainnya yang ditemukan. Dengan langkah ini, sumber-sumber tersebut dapat dianggap valid sebagai bahan sejarah. Peneliti yakin terhadap keabsahan sumber sekunder seperti buku "Demi Bangsa: Pertentangan Soekarno-Hatta" yang ditulis oleh Wawan Tunggul Alam, karena buku ini mengulas berbagai perbedaan dan pertentangan pandangan antara Soekarno dan Hatta selama periode pergerakan kemerdekaan dan pasca-proklamasi. Hubungan kedua tokoh proklamator ini mengalami perubahan yang dipengaruhi oleh polemik yang berkelanjutan dan kepentingan politik yang melibatkan keduanya.

### 3. Interprestasi

Ada dua komponen yang sangat penting, yakni "fakta sejarah dan penafsiran atau interpretasi." Tahap interpretasi merupakan langkah lanjutan dari menganalisis sumber secara kritis<sup>18</sup>. Penulis melanjutkan untuk interpretasi sumber berdasar fakta. Penemuan fakta yang terkumpul harus saling berkaitan sehingga tidak berdiri sendiri, membentuk rangkaian peristiwa yang berhubungan. Penulis berupaya menginterpretasikan temuan data untuk memahami fakta mengenai pertentangan Soekarno-Hatta.

### 4. Historiografi

Historiografi adalah tahap terakhir metodologi sejarah, di mana sejarawan menerapkan pemikiran intensif<sup>19</sup>. Proses ini melibatkan keterampilan dalam menggunakan kutipan, catatan, serta analisis kritis untuk menghasilkan pemahaman menyeluruh dari hasil penelitian. Historiografi merupakan langkah akhir bagi

---

<sup>18</sup> (Kuntowijoyo 2005) Hlm 100-102

<sup>19</sup> (Kuntowijoyo 2005)Hlm 153

merangkai kembali peristiwa sejarah Soekarno-Hatta dalam Pertentangan Kebijakan Politik. Penulis selalu berupaya melalui karya skripsi ini untuk membahas ”Soekarno Hatta Dalam Pertentangan Kebijakan Politik Indonesia 1945-1956”.

### **1.9 Sistematika Penulisan**

Sistematika penulisan proposal ini terdiri dari tiga bagian: pendahuluan, isi, dan penutup. Bagian awal mencakup halaman judul penelitian, persetujuan pembimbing, pengesahan, pernyataan, abstrak, kata pengantar, daftar isi, dan lampiran. Bagian isi terdiri dari lima bab, di mana setiap bab dibagi lagi menjadi beberapa sub bab dengan urutan sebagai berikut:

**BAB I** : Terdiri dari pendahuluan, dalam bab ini terdiri atas latar belakang, rumusan masalah, ruang lingkup penelitian, tujuan dan manfaat penelitian, tinjauan pustaka, kerangka konseptual, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

**BAB II** : Kebijakan Politik Indonesia 1945-1956.

**BAB III** : Menjelaskan awal mula pertentangan Kebijakan Politik terjadi antara Soekarno–Hatta .

**BAB IV** : Akibat dari Pertentangan Kebijakan Politik Indonesia terhadap sistem pemerintahan Indonesia